

Analisis *Flypaper Effect* di Kabupaten/Kota Kalimantan Utara

Yosua Serbujaya Sitompul *

* Penulis korespondensi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

Abstract

JEL Classification Code:
H500, R5.

Kata kunci:

Flypaper effect, dana perimbangan, pendapatan daerah, belanja daerah

Email penulis:

2016110032@student.unpar.ac.id*

North Kalimantan, young province which inaugurated in 2012, has limited local revenues so it requires funds (Dana Perimbangan) from the central government. The funds should be a stimulus for regional self-reliance. However, In many cases, the local government prefer to use balancing funds rather than explore their own potential, this behavior is known as the flypaper effect. This research was conducted to find the effect of Dana perimbangan and regional income on regional spending. In addition, this study aims to analyze whether there is a flypaper effect in the districts/cities in North Kalimantan using Panel Linear Regression Model. The result indicates no flypaper effect since not only Dana Perimbangan but also regional income significantly effect regional spending.

Abstrak

Kalimantan Utara, provinsi muda yang diresmikan tahun 2012 ini memiliki pendapatan asli daerah yang terbatas sehingga membutuhkan dana (Dana Perimbangan) dari pemerintah pusat. Dana tersebut harus menjadi stimulus bagi kemandirian daerah. Namun dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih memilih menggunakan dana perimbangan daripada menggali potensinya sendiri, perilaku ini dikenal dengan istilah *flypaper effect*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana perimbangan dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat *flypaper effect* di kabupaten/kota di Kalimantan Utara dengan menggunakan Model Regresi Linear Panel. Hasilnya menunjukkan tidak ada *flypaper effect* karena tidak hanya Dana Perimbangan tetapi juga pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pendahuluan

Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2012. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Kalimantan Utara memiliki pendapatan daerah yang terbatas sehingga dalam melakukan pembangunan masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap daerah wajib untuk membuat suatu rencana atau anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan perencanaan APBD ini agar pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dibelanjakan.

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu penyediaan pelayanan barang publik. Barang publik yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan yang sesuai perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang, jasa,

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Bentuk pelayanan publik dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Kebutuhan pelayanan publik berbeda-beda setiap daerah. Untuk mewujudkan kebutuhan pelayanan publik, pemerintah memerlukan pengeluaran yang disebut belanja daerah. Permasalahan dalam pembiayaan pembangunan yaitu pemerintah daerah terlalu mengandalkan dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi ekonomi yang berada di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana perimbangan untuk hal-hal produktif sehingga dapat meningkatkan pajak lokal agar pendapatan daerah dapat meningkat dan ketergantungan dana dari pemerintah pusat bisa berkurang.

Pendapatan daerah hanya mampu membiayai belanja modal sebesar 20% (Kuncoro, 2004). Hal ini yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat perilaku atau respon pemerintah apakah terjadi inefisien pada dana perimbangan tersebut, dapat dilihat melalui respon pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Hal ini dikenal dengan *flypaper effect*.

Berdasarkan kajian empiris dari beberapa peneliti terdahulu yang menganalisis *flypaper effect* diberbagai daerah menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif. Penelitian Maimunah (2006), Armawaddin (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* pada kabupaten/kota yang menjadi objek penelitiannya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nabilah et al. (2016), Pramuka (2010) yang mengindikasikan tidak terdapat *flypaper effect* di kabupaten/kota pulau Jawa. Secara administratif, Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu:

Tabel 1. Wilayah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten / Kota	Ibu kota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Nunukan	Nunukan	13.841,90 km ²
2	Kabupaten Malinau	Malinau	42.620,70 km ²
3	Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72 km ²
4	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58 km ²
5	Kota Tarakan	Tarakan	250,8 km ²

Sumber : <https://kaltaraprov.go.id>

Permasalahan umum pada daerah yang baru dimekarkan adalah terdapat rent seeker dari kegiatan pemerintahan daerah serta memiliki potensi masalah anggaran dari pusat ke daerah. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka aliran dana perimbangan dari pusat menuju pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menjadi tidak efisien. Pemberian dana perimbangan yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah justru tidak disambut dengan baik oleh daerah. Daerah menjadi tidak mandiri, tetapi semakin bergantung kepada pemerintah pusat. Permasalahan ketergantungan ini menyebabkan pemerintah daerah merespon dana perimbangan menjadi inefisien dalam melakukan belanja daerah dibanding mengelola potensi daerah sendiri, dikenal dengan istilah *flypaper effect*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pagu belanja APBN yang dialokasikan di wilayah Kaltara untuk TA 2017 sebesar Rp3,15 triliun. Pagu belanja APBN di wilayah Kaltara tersebut meningkat Rp665,43 miliar dibandingkan pagu belanja tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltara mencapai Rp2,90 triliun atau 92,0% dari total pagu belanja TA 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi APBN mengindikasikan bahwa Pemerintah Pusat tengah mengupayakan akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah Kaltara. Seharusnya peningkatan akselerasi pembangunan ekonomi bisa dilakukan secara efisien. Namun faktanya belum tentu begitu. Oleh sebab itu perlu adanya pendeteksian *flypaper effect* di kab/kota di Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan dana

perimbangan dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Utara dan juga untuk menganalisa apakah terjadi *flypaper effect* di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara. Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan teori *flypaper effect* dan penelitian sebelumnya yang membahas *flypaper effect* dibagian kedua. Pada bagian ketiga akan membahas mengenai data dan metodologi yang digunakan dalam penelitian, pada bagian keempat membahas hasil temuan secara empiris. Pada bagian kelima akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan di wilayah Kalimantan Utara

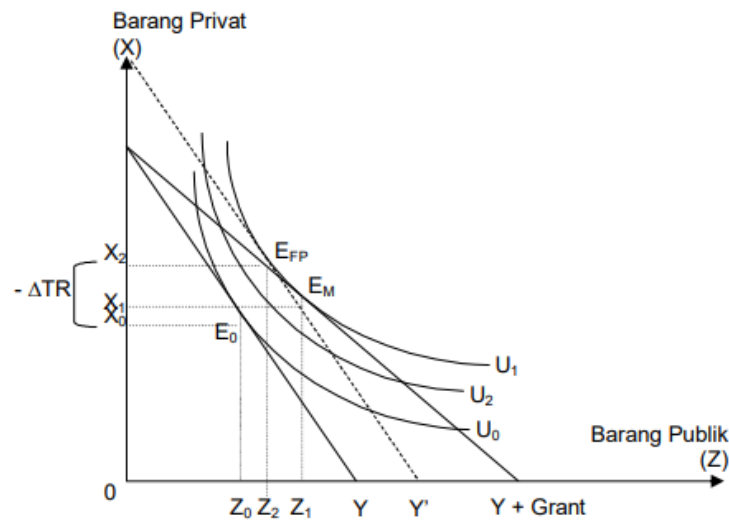
	2016			2017			2018
	Pagu Rp Juta	Realisasi Rp Juta	%	Pagu Rp Juta	Realisasi Rp Juta	%	Pagu Rp Juta
Kota Tarakan	871.605	795.214	91,2	956.055	882.746	92,3	678.100
Kab. Bulungan	664.452	494.525	74,4	1.359.403	1.255.765	92,4	1.277.944
Kab. Malinau	104.864	88.662	84,5	128.829	115.970	90,0	806.424
Kab. Tana Tidung	20.207	15.835	78,4	11.276	9.293	82,4	14.992
Kab. Nunukan	265.455	247.214	93,1	357.727	345.478	96,6	347.058
Prov. Kalimantan Utara	557.917	482.424	86,5	336.641	287.219	85,3	338.578
Total Kalimantan Utara	2.484.500	2.123.873	85,5	3.149.931	2.896.470	92,0	3.463.197

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

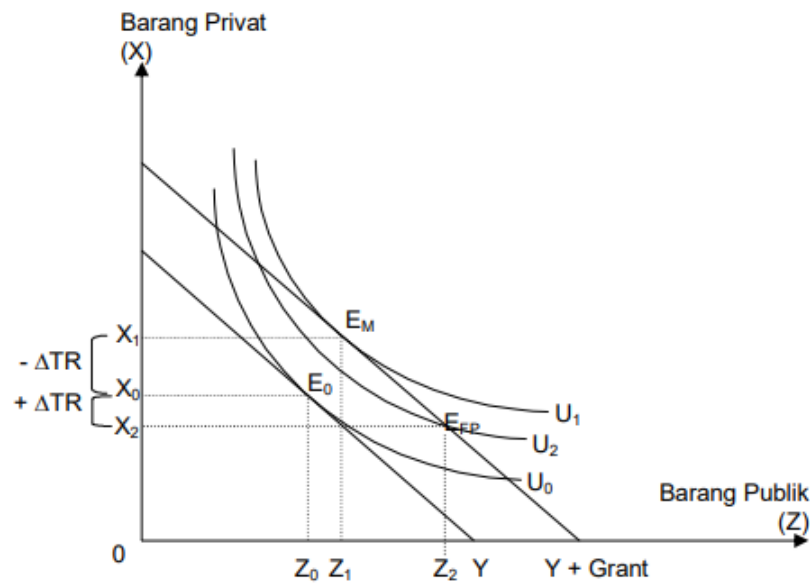
Landasan Teori dan Tinjauan Literatur

Dana perimbangan dikategorikan menjadi 2 yaitu transfer bersyarat (*conditional grants*) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dan transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) berupa Dana Alokasi Umum (DAU)

Gambar 1. Pengaruh transfer bersyarat



Sumber: Kuncoro (2004)

Gambar 2. Pengaruh transfer tidak bersyarat

Sumber: Kuncoro (2004)

Dalam kasus bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*), transfer sebesar G memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+G$ pada gambar 3. Menurut Bradford dan Oates (1971a, 1971b), barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan asumsi tersebut, maka transfer yang bersifat umum (lump sump) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 ke E_M . Pada posisi keseimbangan yang baru mengakibatkan konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi Z_1 dan X_1 . Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar $-\Delta TR$, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, banyak ekonom yang mengamati pemunculan anomali (Gramlich, 1977), menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik EFP (bukannya pada EM) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah ($+\Delta TR$) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z_1 menjadi Z_2). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitut bagi pajak daerah.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Pemikiran mengenai *flypaper effect* dapat dikategorikan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (bureaucratic model) dan ilusi fiskal (fiscal illusion model). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Pelopor pemikiran birokratik dimulai oleh Niskanen (1968). Dalam pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Dengan asumsi ini, kuantitas barang publik

disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran.

Secara tidak langsung, model pemikiran birokratik menjelaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak / pendapatan daerah. *flypaper effect* terjadi karena adanya kewenangan pengetahuan birokrat mengenai transfer. Informasi lebih yang dimiliki birokrat memungkinkannya memberikan pengeluaran yang berlebih.

Oates (1979) menyatakan *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan model ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Hal ini berarti *flypaper effect* adalah akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan dana perimbangan dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah dan menganalisa apakah terjadi *flypaper effect* di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Utara. Variabel dependen yang digunakan yaitu belanja daerah dan variabel independen yang digunakan yaitu variabel pendapatan daerah dan dana perimbangan. Penelitian ini menggunakan Panel least square (PLS) untuk menemukan pengaruh antar variabel independen dan dependen. Data yang digunakan berupa data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Bank Indonesia berupa Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) provinsi Kalimantan Utara. Jenis data yang digunakan yaitu data panel untuk periode 2017-2018 dalam bentuk triwulan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3. Data

Varia bel	Definisi Data	Satuan	Sumber
Belanja Daerah(BD)	Realisasi belanja daerah untuk wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Utara	Jutaan Rupiah	Bank Indonesia (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional)
Dana Perimbangan(DP)	Realisasi Pagu APBN untuk wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Utara	Jutaan Rupiah	Bank Indonesia (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional)
Pendapatan Daerah(PD)	Realisasi pendapatan daerah di kabupaten/kota di Kalimantan Utara	Jutaan Rupiah	Bank Indonesia (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional)

Panel Least Square

Panel Least Square adalah suatu metode analisis yang menggunakan struktur data panel yang terdiri dari *cross section* dan *time series* dimana beberapa individu diteliti dalam waktu yang berbeda. *Cross section* diindikasikan dengan jumlah individu ($i=1,2,3,\dots,n$) dan *time series* dijelaskan dengan periode waktu ($t=1,2,3,\dots,t$), berikut ini adalah persamaan estimasi dari regresi *Panel Least Square* adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan Panel Least Square diatas, maka persamaan estimasi untuk menemukan pengaruh dana perimbangan dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \dots + \beta_n PD_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

dimana *BD* adalah belanja daerah, *DP* adalah dana perimbangan, dan *PD* adalah pendapatan daerah. Metode *Panel Least Square* akan menghasilkan hasil estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE) apabila uji asumsi klasik terpenuhi (*non-autocorrelation, non-multicollinearity, dan non-heteroscedasticity*). Dalam model estimasi data panel ini dapat dilakukan melalui tiga model estimasi yang terdiri dari *Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model*. Model estimasi yang terbaik akan digunakan sebagai hasil estimasi regresi data panel.

Common Effect Model

Common Effect Model adalah model regresi dasar untuk data panel yang menggunakan prinsip *Ordinary Least Square* (OLS). Pada *common effect model* tidak memperhatikan dimensi *cross section* yang berarti perilaku individu dalam berbagai kurun waktu tidak berubah. Dengan begitu, dimensi waktu (*time series*) lebih dominan daripada dimensi *cross section* dalam model ini.

Fixed Effect Model

Fixed Effect Model adalah model yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel ini dapat menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersepnya, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan *cross section*. Namun demikian slope antar *cross section* adalah sama. Oleh karena itu, dimensi *cross section* lebih dominan dibandingkan dimensi *time series*. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable*.

Random Effect Model

Random Effect Model adalah model yang mengasumsikan setiap *cross section* mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel acak. Model estimasi ini sangat berguna jika individu yang diambil sebagai sampel yang dipilih secara acak dan merupakan wakil dari populasi. Teknik ini memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Model ini juga disebut *Error Component Mode* (ECM) atau teknik *Generalized Least Squares* (GLS).

Hasil dan Pembahasan

Pengujian pertama adalah multikolinearitas. Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara setiap variabel independennya. Pada penelitian ini, uji multikolinearitas yang digunakan adalah uji kolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk memenuhi asumsi klasik dan menemukan apakah terdapat kolinearitas antar variabel independennya. Hasil Uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya korelasi jika koefisien antara variabel independen kurang dari 0,8. Berdasarkan Tabel 2, persamaan model estimasi menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dimana koefisien setiap variabel independennya kurang dari 0,8.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	<i>DP</i>	<i>PD</i>
<i>DP</i>	1.000000	0.377292
<i>PD</i>	0.377292	1.000000

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas semua variabel independen lolos uji heteroskedastisitas. Hal tersebut terlihat berdasarkan nilai koefisien dari setiap variabel independent. Ketika nilai koefisien signifikan (*p-value*<0,05) maka variabel tersebut tidak lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas

	<i>Prob.</i>
C	0.0944
DP	0.9953
PD	0.3371

Chow test digunakan untuk membandingkan model estimasi mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Terdapat hipotesis dalam penentuan model terbaik diantara keduanya. Penentuan model dilihat melalui $p\text{-value} < 0,05$ atau $p\text{-value} > 0,05$. Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka tolak H_0 namun jika $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak tolak H_0 . Hipotesis dalam *Chow Test* adalah H_0 : *Common Effect Model* dan H_1 : *Fixed Effect Model*.

Tabel 6. Hasil Uji *Chow*

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Period F	12.818331	(7,30)	0.0000
Period chi-square	55.361110	7	0.0000

Berdasarkan hasil Uji *Chow* diatas, period F dan *Period chi-square* memiliki $p\text{-value} < 0,05$ yang berarti menolak H_0 . Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Berdasarkan hasil uji *Chow* yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect* lebih baik digunakan untuk persamaan estimasi maka akan berlanjut ke Uji *Hausman*.

Selanjutnya Uji *Hausman* dilakukan untuk membandingkan model estimasi mana yang terbaik, apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pengambilan model yang terbaik dilakukan dengan memenuhi hipotesis. Apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka tidak menolak H_0 , sedangkan $p\text{-value} < 0,05$ maka menolak H_0 . Hipotesis dalam Uji *Hausman* adalah H_0 : *Random Effect Model* dan H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 7. Hasil uji Hausman

Test Summary	Chi-sq Statistic	Chi-sq d.f	Prob
Period random	17.592748	2	0.0002

Berdasarkan hasil Uji *Hausman* diatas, persamaan memiliki $p\text{-value} < 0,05$ yang berarti menolak H_0 dimana model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Persamaan ini tidak melakukan Uji *Lagrange* karena model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

Berdasar pebgujian diatas maka dalam studi ini digunakan *Fixed Effect Model*. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 8. Hasil *Panel Least Square*

Variabel terikat : Belanja Daerah (BD)		
	Coefficient	Prob
C	92925.69	0.0075*
DP	0.320639	0.0001*
PD	0.519299	0.0000*

*) Signifikan level 5%

Pada hasil *Panel Least Square* diatas menunjukkan semua koefisien signifikan pada level 5% yang berarti bahwa variabel independen (DP dan PD) memengaruhi variabel dependen (belanja daerah). Ketika dana perimbangan bertambah 1 juta rupiah maka belanja daerah akan bertambah

sebesar 0.320639 juta rupiah dengan asumsi belanja daerah tetap. Selain itu, ketika pendapatan daerah bertambah 1 juta rupiah, maka belanja daerah akan bertambah sebesar 0.519299 juta rupiah dengan asumsi belanja daerah tetap.

Hasil Temuan Flypaper effect

Hasil *flypaper effect* dapat dideteksi dengan membandingkan koefisien dana perimbangan dan koefisien pendapatan daerah dan kedua koefisien tersebut signifikan (Maimunah, 2006) Apabila kedua koefisien signifikan dan hasil koefisien dana perimbangan lebih besar dibandingkan koefisien pendapatan daerah maka daerah tersebut terjadi *flypaper effect*.

Uji *wald* dapat digunakan untuk menguji nilai sebenarnya parameter dari masing-masing variabel independen. Uji hipotesis wald test adalah H0: Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan dan H1: ada pengaruh variabel - variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Apabila $prob > 0.05$ maka terima H0 dan apabila $prob < 0.05$ maka tolak H0, maka hal ini diartikan bahwa ada pengaruh variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji *Wald*

Test statistic	Value	df	Prob
F-Statistic	683.6040	(3, 30)	0.0000
Chi-square	2049.192	3	0.0000

Hasil *Wald Test* menunjukkan bahwa $prob < 0.05$. Ini berarti hipotesis H0 ditolak, implikasinya yaitu ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini berarti koefisien dana perimbangan dan koefisien pendapatan daerah signifikan secara statistik. Hasil koefisien dana perimbangan lebih kecil (0.320639) dibandingkan koefisien pendapatan daerah (0.519299). Ini berarti daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara tidak terjadi *flypaper effect*.

Kesimpulan dan Implikasi

Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi muda yang baru didirikan pada tahun 2012. Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan masih memiliki keterbatasan berupa pendapatan daerah dan serta masih bergantung pada dana pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Hasil uji persamaan regresi menunjukkan bahwa koefisien dana perimbangan dan koefisien pendapatan daerah signifikan pada tingkat 5%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan fenomena *flypaper effect* di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Utara.

Daftar Pustaka

- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017, Juli 1). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77-91.
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Utara*. Dipetik 11 4, 2019, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltara/Default.aspx>
- Bradford, D. d. (1971b, mei). Toward a Predictive Theory of Inter-governmental Grants. *American Economic Review*, 61(2), 440-8.
- Gramlich, E. (1977). Intergovernmental Grants: A Review of the Empirical Literature. Dalam (. W.E. Oates, *The Political Economy of Fiscal Federalism* (hal. 219-40). Lexington : Lexington Books.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 47-63.

- Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Simposium Nasional Akuntansi 9.*
- Nabilah, A. N., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2016). Analisis *Flypaper Effect* PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. (P. P. Publik, Penyunt.) *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2). Dipetik 11 10, 2019, dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3894/4315>
- Portal Resmi Kalimantan Utara. (t.thn.). *Kaltaraprov.go.id*. Diambil kembali dari <https://kaltaraprov.go.id>
- Pramuka, B. A. (2010, Juni). *Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1-12.
- The Peculiar Economics of Bureaucracy. (1968, mei). *American Economic Review*, 58(2), 239-305.
- Turnbull, G. (1998, Juli). The Overspending and *Flypaper Effect* of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics*, 44(1), 1-26.